



MODUL
TEMA 11

Lahirnya Macan Asia

SEJARAH PEMINATAN PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020



MODUL
TEMA 11

Lahirnya Macan Asia

SEJARAH PEMINATAN PAKET C SETARA SMA/MA KELAS XII



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Sejarah Peminatan Paket C Setara SMA/MA Kelas XII
Modul Tema 11 : Lahirnya Macan Asia

- **Penulis:** Aminullah, S.Pd., M.Pd.; Ady Wijaya, S.Kom., M.Pd.; Drs. Muhammad Yunus
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.
- **Diterbitkan oleh:** Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus—Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 52 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal



Hamid Muhammad

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi..... | iv |
| MODUL 11 LAHIRNYA MACAN ASIA..... | 1 |
| Petunjuk Penggunaan Modul..... | 1 |
| Tujuan Mempelajari Modul..... | 2 |
| Pengantar Modul..... | 2 |
| UNIT 1 RESPON INTERNASIONAL TERHADAP PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI | 4 |
| A. Pengakuan Kemerdekaan RI dari Palestina | 4 |
| B. Pengakuan Kemerdekaan RI dari India | 12 |
| C. Pengakuan Kemerdekaan RI dari Australia | 16 |
| Penugasan 1 | 20 |
| UNIT 2 PERAN PBB TERHADAP KEMERDEKAAN RI | 22 |
| A. Kontak Indonesia dengan PBB | 23 |
| B. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI | 24 |
| Penugasan 2..... | 31 |
| UNIT 3 KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN SIKAP BELANDA TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA | 33 |
| A. Pengertian Konferensi Meja Bundar (KMB)..... | 33 |
| B. Pembentukan Perwakilan Indonesia dan Peserta yang Hadir pada KMB..... | 34 |
| Penugasan 3..... | 39 |
| Rangkuman..... | 41 |
| Saran Referensi | 42 |
| Soal Latihan | 43 |
| Kunci Jawaban..... | 47 |
| Kriteria Pindah/Lulus Modul | 49 |
| Daftar Pustaka | 50 |
| Biodata Penulis | 51 |



LAHIRNYA MACAN ASIA

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini terdiri dari beberapa materi yang disusun secara berurutan mulai dari unit 1 s.d. unit 3. Pembahasan setiap unit merupakan satu kesatuan. Untuk dapat memahami modul secara baik, Anda perlu mengikuti petunjuk berikut untuk membaca modul.

Baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh.

1. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul.
2. Mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
3. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
4. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.
5. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.
6. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda.
7. Selamat membaca dan mempelajari modul

Tujuan Mempelajari Modul

Setelah membaca dan mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan dapat :

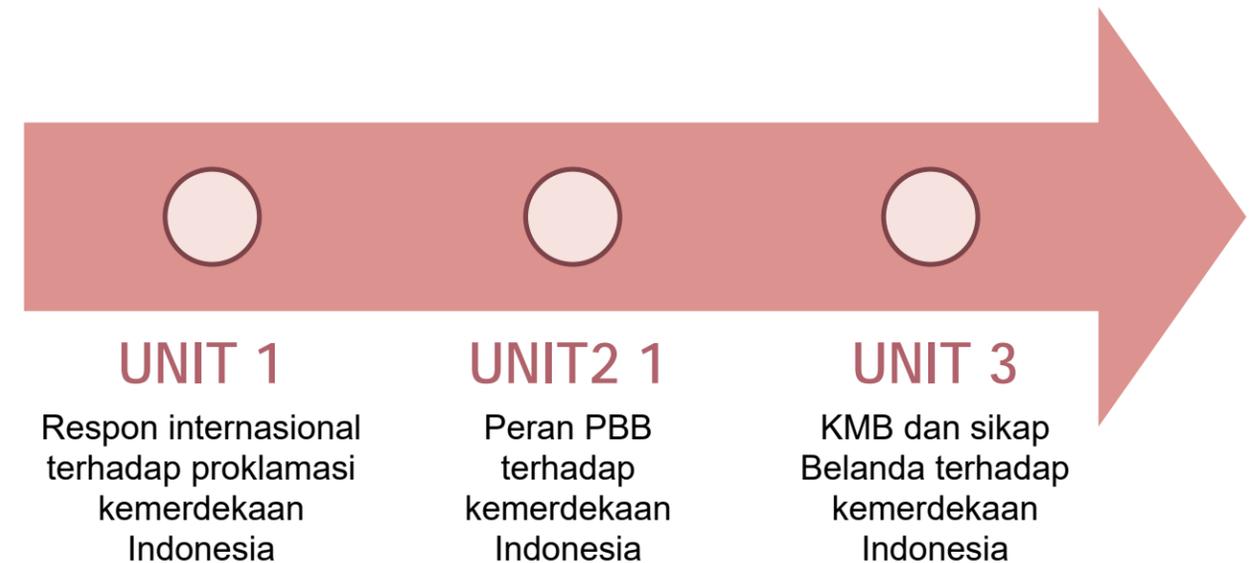
1. Menjelaskan bentuk-bentuk respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
2. Menjelaskan peran PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia (RI)
3. Menjelaskan pengaruh Konfrensi Meja Bundar (KMB) dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Republik Indonesia (RI)

Pengantar Modul

Sejarah lahirnya Negara Republik Indonesia hingga menjadi Macan Asia merupakan perjuangan panjang bangsa Indonesia yang puncaknya adalah Pengucapan Proklamasi kemerdekaan RI oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada banyak peristiwa penting yang terjadi di seputar proklamasi hingga lahirnya Negara Kesatuan RI.

Modul “Lahirnya Macan Asia” akan terbagi dalam 3 unit bahasan, yaitu :

1. Respon internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, memuat penjelasan tentang bagaimana sikap Negara-negara luar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Negara-negara apa saja yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia.
2. Peran PBB Terhadap Kemerdekaan RI, memuat penjelasan mengenai fungsi dan peran PBB terhadap pengakuan kemerdekaan RI
3. KMB dan Sikap Belanda terhadap Kemerdekaan RI, memuat penjelasan tentang Forum Konfrensi Meja Bundar (KMB) dan sikap Kerajaan Belanda terhadap kemerdekaan RI.



Gambar 1. Alur isi Modul 11 Lahirnya Macan Asia

Setelah Proklamator kemerdekaan RI Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI secara *de facto* (Pengakuan dari dalam) pada 17 Agustus 1945, gaung kemerdekaan Indonesia membahana ke seluruh penjuru dunia. Namun perlu diingat bahwa untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum atau *de jure*. Pengakuan kedaulatan Indonesia pertama kali bukanlah dilakukan oleh negara-negara Barat, melainkan datang dari negara-negara muslim di Timur Tengah. Gaung dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina dan Mesir yang kemudian disusul oleh Negara-negara lainnya.

A. Pengakuan Kemerdekaan RI dari Palestina

Palestina adalah Negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan RI di saat negara-negara lain belum memutuskan sikap. Pengakuan ini dilontarkan saat Indonesia masih dijajah tentara Jepang. Pada 6 September 1944, di wakili oleh Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia secara *de facto*. Pengakuan ini diumumkan melalui Radio Berlin (Jerman) berbahasa Arab. Berita yang disiarkan melalui radio tersebut terus disebarluaskan selama 2 hari berturut-turut. Berita ini juga disiarkan oleh Buletin terkenal, yaitu buletin harian "Al-Ahram".

Saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini diketahui tengah bersembunyi di Jerman pada permulaan Perang Dunia II. Ulama kharismatik tersebut mengumumkan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia di tengah situasi sulit. Ia diketahui tengah berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina. Tak hanya memberi dukungan, Syekh



Foto Mufti Besar Palestina M. Amin Husaini (bersorban) bersama Delegasi Indonesia
Sumber : <https://islamindonesia.id/kisah/palestina-negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia.htm>

Muhammad Amin Al-Husaini kemudian mendesak Negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengikuti jejaknya.

Saat ini hubungan antara kedua negara tetap terjalin erat meskipun dengan berbagai kendala politik. Makna hubungan antara kedua negara dalam peristiwa sejarah hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Politik

Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikannya Negara Palestina di Aljazair, 15 November 1988. Sebagai wujud dukungan lebih lanjut dari Indonesia kepada Palestina, pada tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani "Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik" antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Menlu Palestina, Farouq Kaddoumi, yang sekaligus menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.

Duta Besar pertama Palestina untuk Indonesia menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Presiden Soeharto pada 23 April 1990. Sebaliknya, Pemerintah RI menetapkan bahwa Duta Besar RI di Tunis juga diakreditasi bagi Negara Palestina. Sejak 1 Juni 2004, akreditasi Palestina berada di bawah rangkapan KBRI Yordania.

Sejak itu, melalui berbagai forum, termasuk PBB, OKI, dan GNB, Indonesia secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya secara penuh. Dalam kaitan ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan suara dukungan sehingga Palestina dapat menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011, dan memperoleh status "negara" (*non-member observer state*), dari sebelumnya hanya berstatus "entitas" (*non-member observer entity*), dalam keputusan Sidang Majelis Umum PBB 29 November 2012.

Pada tanggal 10 September 2015, Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi, yang memperkenankan pengibaran bendera negara-negara peninjau PBB (Tahta Suci Vatikan dan Palestina) di Markas dan kantor-kantor PBB, melalui pemungutan suara, dengan hasil 119 mendukung, 45 abstain, dan 8 menolak. Indonesia menjadi salah satu *co-sponsor* dan memberikan suara mendukung dalam pemungutan suara. Selain Indonesia, Palestina memperoleh *co-sponsorship* dari 54 negara yang lain.

Selama 2015, Indonesia juga telah menjadi tuan rumah dua konferensi, yaitu: (1) KTT Asia-Afrika pada bulan April 2015 dalam rangka memperingati 60 Tahun Konferensi

Asia-Afrika (KAA) 1955, yang diselenggarakan Pemri dan menghasilkan a.l. deklarasi khusus mengenai dukungan kepada Palestina, dan (2) *International Conference on the Question of Jerusalem*, 14–15 Desember 2015, serta *UN Civil Society Forum on the Question of Palestine*, 16 Desember 2015, yang diselenggarakan PBB atas kerja sama dengan OKI dan Pemri di Jakarta.

Pada tataran bilateral, kedua negara belum dapat merealisasikan banyak kerja sama nyata sehubungan dengan keterbatasan yang dialami Palestina akibat pendudukan israel. Meskipun demikian sejak tanggal 13 Maret 2016, Indonesia telah memiliki Konsul Kehormatan yang terletak di Ramallah, yang bertugas antara lain mempromosikan kerja sama antara kedua negara.

2. KTT OKI & Deklarasi Jakarta

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (KTT OKI) pada 6-7 Maret 2016 di Jakarta guna membahas dukungan terhadap Palestina yang dituangkan dalam Resolusi dan Deklarasi Jakarta. Terdapat 56 negara anggota, 4 negara pengamat, dan 4 pihak yang terlibat dalam proses perdamaian antara Palestina dengan israel dalam KTT ini.

Draft Resolusi berisi tentang upaya menegaskan kembali posisi, prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina. Sementara Deklarasi Jakarta berisi tentang inisiatif Indonesia yang memuat rencana aksi konkret para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

3. Ekonomi

Perdagangan bilateral Indonesia-Palestina belum menunjukkan volume yang besar. Minimnya volume perdagangan kedua negara tidak terlepas dari kondisi dalam negeri Palestina yang terus dilanda konflik serta kebijakan pembatasan pergerakan manusia dan arus barang ke/dari Palestina oleh pemerintahan israel.

4. Sosial Budaya

Indonesia dan Palestina memiliki kerja sama bilateral di bidang pendidikan, yang telah menghasilkan peningkatan jumlah WN Palestina serta WN Yordania keturunan Palestina yang menempuh studi di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baik melalui beasiswa maupun pembiayaan pribadi. Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Palestina juga memiliki kerja sama di bidang pendidikan yang tertuang dalam MoU tentang kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam hubungan diplomatik. MoU tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2007. Salah satu

bentuk kerjasamanya adalah pelatihan bagi pada diplomat Palestina di Indonesia yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kemlu RI.

Melalui upaya bersama KBRI Amman dan ikatan alumni Palestina yang pernah belajar di Indonesia, telah



<https://cdn.medcom.id/dynamic/content/2017/01/01/636249/elsXYFfJqN.jpg?w=1024> dibentuk *Palestinian-Indonesian Friendship Association* (PIFA) yang telah mendapat pengesahan dari Kemendagri Palestina pada tanggal 1 Oktober 2013. PIFA telah berperan dalam mempererat hubungan *P-to-P* kedua bangsa, termasuk mediasi hubungan sosial-budaya, seperti dalam hal penyaluran beasiswa Indonesia kepada pelajar Palestina serta kegiatan seni-budaya lainnya.

Di bidang pariwisata, pada saat kunjungan PM Palestina ke Indonesia di tahun 2014, telah ditandatangani MoU di bidang pariwisata. Salah satu bentuk implementasi MoU tersebut adalah penyelenggaraan pameran, konferensi, lokakarya, dan seminar untuk mendorong kunjungan wisatawan dari kedua negara. Industri wisata adalah salah satu pemasukan penting bagi Palestina, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Indonesia dan Palestina memiliki kerja sama kota kembar, yaitu antara ibukota negara, Jakarta dan Al-Quds Al-Sharif. MoU tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2007 yang meliputi kerja sama antara lain di bidang pengendalian bencana dan krisis, pendidikan dan pelatihan, sosial dan budaya.

5. Konsul Kehormatan RI di Ramallah

Pada tanggal 13 Maret 2016, Menlu RI telah melantik Konsul Kehormatan (Konhor) RI di Ramallah, Ibu Maha Abou Susheh. Pelantikan tersebut dilaksanakan di KBRI Amman, dan dihadiri oleh Menlu Palestina, H.E. Riyad Malki, para Dubes asing di Yordania, pejabat Pemerintah, dan para undangan lainnya. Saat ini di mana pandemi Covid 19 sedang melanda Indonesia, namun hubungan kedua negara tetap erat. Perwujudan hubungan erat tersebut nampak dari bantuan Indonesia ke para pengungsi Palestina.

Pengakuan Kemerdekaan RI dari Mesir

Mesir adalah salah satu sekutu awal yg mengakui kemerdekaan Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Dari sisi kronologi, Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomat RI di Ibu Kota Kairo beberapa bulan setelah Soekarno mengkonsolidasikan kabinet. Tak sekadar mengakui, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Baru pada 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara RI secara de jure, dengan menunjuk H.M Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo. Hubungan Republik Indonesia dengan Liga Arab pun secara formal terjalin. Liga Arab lah yang berkali-kali mengecam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer.



"Panitia Pembela Indonesia" yang terdiri dari pembesar-pembesar Mesir, Arab dan Islam. Di tengah-tengah Sutan Syahrir, di kanannya Jenderal Saleh Harb Pasya (Ketua), Hassan Al-Banna dan di kirinya Syekh A. Latif Diraz, Dr. M. Salahuddin Pasya, Dr. A. Wahab Azzam Pasya, dan berdiri di belakang Syahrir, Ahmad Hussein dan M. Salim serta beberapa pimpinan Panitia Pusat.

Sumber : <https://www.dakwatuna.com/2013/07/12/36692/mengenang-kembali-jasa-mesir-untuk-indonesia/#axzz5ZpPKLDqK>

1. Sebab-Sebab Mesir Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI

- Persamaan Agama
- Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir
- Banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir
- Banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab

2. Proses Indonesia Mendapatkan Kedaulatan dari Mesir

- Peranan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir (Univ. Al-Ahar, Kairo dan Zain Hassan), Irak (Univ. Imron Rosyidi), dan di negara Arab lainnya Peranan Mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di Arab.

b. Delegasi Indonesia pertama RI di Mesir (7 April 1946)

Utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terimakasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan pada kemerdekaan RI dan akan tetap memberi dukungan sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya.

c. Pembentukan Panitia Pusat sebagai wakil Indonesia di Luar Negeri

Panitia Pusat yang diketuai H. Agus Salim punya peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. H. Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri, dari Kairo H. Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transyordania, Irak, dan Lebanon. Untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab dan Yaman dilanjutkan oleh H. Rasyidi.

d. Kunjungan yang dilakukan Sutan Syahrir dan Soekarno ke Mesir Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terimakasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan.

3. Peran Mesir dalam Mendukung Kemerdekaan RI

- Peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin Syaikh Hasan Al-Banna
- Aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo
- Mengirim delegasi Mesir (Abdul Mun'im) ke Yogyakarta
- Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI (18 Nov 1946)
- Ditandatangani perjanjian persahabatan antara RI (H. Agus Salim) dan Mesir (Fahmi Nokrasyi Pasha) (10 Juni 1947)
- Menteri LN Mesir dibawah kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia
- Aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda
- Rapat Umum oleh organisasi dan parpol di Mesir. Pada rapat umum tersebut

juga dihadiri Presiden Habib Burguiba dari Tunisia, dan pemimpin Maroko Allal Al-Fassi. Resolusi yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah:

- 1) Pemboikotan barang-barang buatan Belanda, diseluruh Negara Negara Arab
- 2) Pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dan Belanda
- 3) Penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda
- 4) Pembentukan perangkatan kesehatan untuk menolong korban Agresi Belanda

Sampai sekarang hubungan Indonesia dengan Mesir masih sangat erat. Makna hubungan kedua negara nampak dalam peristiwa sejarah hingga saat ini yaitu:

1. Politik

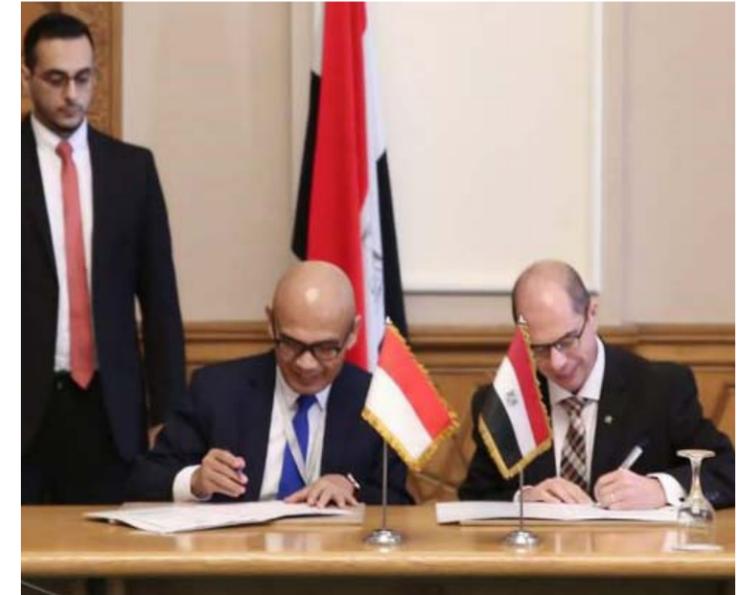
Indonesia dan Mesir mengadakan Konsultasi Bilateral di Kairo pada tanggal 27 Juni 2017. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Asia dan Pasifik, Desra Percaya, sedangkan Asisten Menlu Mesir urusan Asia dan Kepulauan Pasifik, Hani Selim memimpin delegasi Mesir. Selain untuk mereview perkembangan bilateral antar kedua negara di berbagai bidang, pertemuan ini juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, khususnya isu Palestina serta stabilitas dan keamanan kawasan.

Di tengah dinamika kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis seperti saat ini, pertemuan bilateral dengan Mesir kali ini merupakan momentum yang sangat penting. Dirjen Desra Percaya menilai Mesir mempunyai posisi yang krusial dan strategis dalam mengawal stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Sehari sebelumnya, telah dilakukan pertemuan teknis persiapan Konsultasi Bilateral yang melibatkan sejumlah Kementerian dan BUMN dari kedua negara. Dari Indonesia hadir perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan PT WIKA. Ada banyak perkembangan dalam hubungan bilateral RI-Mesir selama 6 tahun terakhir yang perlu dikonsolidasikan. RI-Mesir perlu duduk bersama untuk memetakan dan menyepakati langkah peningkatan kerja sama bilateral antar kedua negara di berbagai bidang, terutama perdagangan dan investasi.

2. Disepakati 6 MoU

Sedikitnya terdapat 6 bidang kerja sama yang telah disepakati MoUnya dan akan segera dapat ditandatangani di bidang Pembentukan Sidang Komisi Bersama, pembentukan Joint Trade Committee, Kerja sama Perikanan, Kesehatan, Energi dan Pertahanan. Dalam pertemuan Konsultasi Bilateral, Desra menerangkan bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. Untuk membuka akses pasar bagi produk ekspor kedua negara, Indonesia dan Mesir sepakat untuk membentuk Joint Feasibility Studies yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) RI-Mesir.

Kedua negara merupakan kekuatan ekonomi terbesar di masing-masing kawasan. Indonesia dapat memanfaatkan Mesir sebagai hub untuk mendapatkan akses lebih besar ke Afrika dan Eropa serta Timur Tengah. Sementara Mesir dapat menjadikan Indonesia sebagai hub untuk masuk ke pasar ASEAN. Terkait



<https://posberitakota.com/wp-content/uploads/2019/06/IMG-20190628-WA0068-696x464.jpg>

kerja sama investasi, Desra menyampaikan bahwa Mesir yang sedang menjalankan berbagai proyek pembangunan infrastruktur guna merealisasikan visi 2030, merupakan target potensial bagi outbound investment Indonesia di bidang konstruksi dan transportasi. Saat ini BUMN Indonesia sedang mendorong PT. WIKA dan PT. INKA untuk menangkap peluang di Mesir. PT. INKA yang ikut dalam kunjungan ke Mesir telah kita pertemukan langsung negara mitra potensialnya di Mesir.

Beberapa persoalan lain yang menjadi perhatian kedua negara juga dibahas dalam pertemuan Konsultasi Bilateral seperti isu-isu kekonsuleran terutama yang menyangkut upaya perlindungan WNI di Mesir. Dalam kaitan ini, Pemri telah sampaikan proposal kepada pihak Mesir untuk menjajaki kembali pembahasan kesepakatan Mandatory Consular Notification (MCN). Sebagai langkah awal, kedua negara sepakat untuk membentuk Tim yang akan melakukan dialog kekonsuleran guna membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Dalam pertemuan, Indonesia sampaikan berbagai perkembangan di Kawasan khususnya pengesahan ASEAN terkait ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan peran ASEAN di Myanmar serta prioritas Indonesia di DK PBB. Selain itu, kedua negara juga membahas perkembangan proses perdamaian di Palestina. "Saat ini Palestina berada di persimpangan jalan, Indonesia akan terus mendukung solusi dua negara sebagai solusi akhir penyelesaian konflik Palestina-Israel", tutup Desra Percaya.

Hubungan diplomatik antara RI dan Mesir telah terjalin sejak 10 Juni 1947. Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Mesir merupakan salah satu mitra dagang non-tradisional yang penting dan mitra ekspor nomor 26 bagi Indonesia. Pada tahun 2018, total nilai perdagangan RI-Mesir mencapai US\$ 1,10 Miliar, dimana Indonesia surplus sebesar US\$ 893.808,40. Warga negara Indonesia di Mesir berjumlah 7.991 orang, dimana 6.229 diantaranya adalah Mahasiswa dan 463 Pekerja sektor Informal.

B. Pengakuan Kemerdekaan RI dari India

Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda Inggris dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib, dan sepenenderitaan. Oleh



Bung Karno dan para pemimpin negara lain. Dari kiri: Nehru (India), Nkrumah (Ghana), Gamal Abdul Nasser (Mesir), Sukarno (Indonesia), dan Tito (Yugoslavia). Sumber : <https://www.goodnews-fromindonesia.id>

karena itu ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa beras 500.000 ton. Peristiwa tersebut terkenal dengan *India rice*. India rice selain untuk memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda kelaparan, juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain.

1. Sebab-Sebab India Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI
 - a. Persamaan Kebudayaan (Hindu-Budha)
 - b. Persamaan nasib (sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka)
 - c. Hubungan dekat antara pemimpin negara (Nehru dan Moh. Hatta) (Feb 1927)
2. Proses Indonesia Mendapatkan Pengakuan Kedaulatan dari India
 - a. Semangat dari Para Pelajar Indonesia yang ada di India

Dibentuknya PPII (Persatuan Putera Indonesia di India). Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Tugas dari PPII adalah:

- 1) Membentuk Balai Penerangan (Indonesia Information Service) 9 Juni 1946
Tugasnya : Menyiarkan, membuat buletin, serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers di India dan nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London
- 2) Bekerjasama dengan Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) yang anggota 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok

b. Diplomasi Sutan Sjahrir

Sutan Sjahrir menandatangani perjanjian bantuan Indonesia kepada India (18 Mei 1946). Indonesia diwakili Sutan Sjahrir dan India oleh K.L Punjabi. Pengiriman padi ini terjadi pada 20 Agustus 1946 di pelabuhan (Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi).



PM Sutan Sjahrir (kanan) menyepakati "diplomasi beras" dengan perwakilan India
Sumber : <https://news.okezone.com>

Dari tindakan ini P.M Nehru mengundang Sjahrir dan Moh.Hatta ke New Delhi untuk menghadiri Konferensi Inter Asian. Dalam Konferensi “Inter Asian Relation” (23 Maret-2 April 1947). Sjahrir berpidato yang isinya :

- 1) Politik Luar Negeri Indonesia (Bebas-Aktif);
- 2) Bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama;
- 3) Menjalin persahabatan dengan bangsa lain.

c. Diplomasi Moh. Hatta

Moh.Hatta bertemu dengan P.M Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India di pegang oleh Inggris.

3. Peran India dalam Mendukung Kemerdekaan RI

- a. Mengirim obat-obatan ke Indonesia (tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirim 500.000 ton padi ke India)
- b. 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ke DK PBB. Akibat dari tindakan India dan Australia, PBB mengeluarkan resolusi (1 Agustus 1947) untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase.
- c. Diadakannya Konferensi Asia di New Delhi (20-25 Januari 1949). Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara asia, seperti: Pakistan, Afganistan, Libanon, Suriah, Saudi Arabia, Philipina, India, Myanmar,Yaman dan Irak. Delegasi Afrika berasal dari Mesir dan Ethiopia. Konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedang Indonesia dalam ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru



Foto : Konferensi Asia Di New Delhi
Sumber :<https://www.berpendidikan.com>

dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
- 2) Pembentukan Pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 Maret 1949
- 3) Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
- 4) Penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950.

Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi dalam lawatan pertama Menteri Luar Negeri India ke kawasan Asia Tenggara sejak dilantik pada Mei 2019. “Indonesia dan India adalah sahabat lama dan mitra strategis di kawasan dan global” ungkap Menlu Retno. Kedua Menlu membahas berbagai upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara khususnya di bidang ekonomi dan maritim. Di bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan upaya bersama dalam mencapai target perdagangan bilateral USD 50 Miliar pada tahun 2025. Hal ini dilakukan melalui upaya untuk membuka lebih lebar akses pasar bagi produk ekspor potensial kedua negara. “Saya angkat secara khusus akses pasar bagi produk minyak sawit dan turunannya serta *stainless steel* Indonesia” tambah Retno. Selain itu, keduanya membahas upaya percepatan proses perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership yang akan mendorong perundingan perdagangan di kawasan dan upaya untuk mencounter pendekatan proteksionisme yang dewasa ini semakin marak. “Saya harap perundingan RCEP dapat diselesaikan pada tahun 2019 ini” pungkas Menlu RI.

Sebagai dua negara maritim, Kedua Menlu membahas kerja sama maritim kedua negara. Kedua pihak sepakat menyelenggarakan Pertemuan *Joint Task Force* antara RI dan India guna menindaklanjuti pengembangan konektivitas dan kerja sama antara Aceh dan Andaman-Nicobar. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara.

Di bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India sepakat untuk terus menjajaki kolaborasi kedua negara melalui produksi bersama antara industri pertahanan, seperti yang telah dilakukan PT Pindad dan Tata Motors sebelumnya. Kedua Menteri Luar Negeri juga berharap Dialog Keamanan

RI – India ke-2 dapat segera terselenggara guna membahas berbagai aspek kerjasama keamanan kedua Negara. Sebagai dua negara besar di kawasan, kedua negara memiliki kesamaan posisi dalam isu-isu regional dan internasional, salah satunya adalah Indo-Pasifik. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan apresiasinya atas dukungan India terhadap *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* serta konsistensi India dalam mendukung integritas teritorial Indonesia

C. Pengakuan Kemerdekaan RI dari Australia



Foto: Soekarno dan diplomat Australia, Thomas Critchley.
 Sumber : <https://www.merdeka.com/dunia/berkat-dukungan-4-negara-ini-indonesia-pertahankan-kemerdekaan/australia.html>

Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia Internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang dekat dengan Indonesia, yaitu hanya dipisah oleh Laut Timor, membuat Australia tidak dapat menutup mata terhadap perkembangan politik di Indonesia.

Terdapat dua peristiwa penting yang menunjukkan intervensi dari pihak pemerintah Australia untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda, yaitu :

1. Sebab-sebab Australia mengakui kemerdekaan RI
 - a. Hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal

dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia, para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Seamen's Union In Sydney (Asosiasi Pekerja), asosiasi tersebut terkejut melihat diskriminasi yang



Pemberitaan Sydney Morning Herald tanggal 25 September 1945
 Sumber: <https://internasional.kompas.com/read/2016/08/17/07415981/melihat.peran.australia.dalam.kemerdekaan.indonesia>.

terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal, asosiasi tersebut memberi tahu pekerja Indonesia bahwa mereka bekerja di Australia yang dihormati hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki hak untuk protes. Diskriminasi yang terjadi:

- 1) Buruh kapal bekerja di lingkungan yang jelek dan gaji sangat minim
 - 2) Perwira kapal gaji layak seperti orang eropa, kerja di lingkungan yang bagus
- b. Persamaan tujuan yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang

2. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia

a. Peran tawanan Belanda (Indonesia) yang dibawa ke Australia

Para tawanan tersebut memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia (kapal Belanda yang datang ke Australia disiapkan untuk membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia) kepada salah satu buruh yang bekerja di pelabuhan. Laporan dari salah satu buruh tersebut nantinya akan diteruskan kepada Queensland Trades and Labor Council dan Waterside Workers Federation (WWF).

b. Peristiwa Black Armada

Peristiwa Black Armada dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia dipemukiman Woolloomooloo mendengar kabar tentang Proklamasi Indonesia. Salah seorang buruh dikapal Belanda bernama Tukliwon (20 tahun) menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberi dukungan.

c. Kunjungan Sutan Syahrir ke Australia (1945)

Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung RI dengan aksi pemboikotan yang dilakukan buruh di Australia. Sutan Syahrir berpidato kepada masyarakat Australia yang mengatakan Australia adalah teman. Sutan Syahrir juga mengatakan kesuksesan Australia memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah dikawasan Pasifik dalam Perang Dunia II.

d. Aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda dipelabuhan Brisbane (24 setember 1945)

e. Peran organisasi Indonesia Political Exile Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda.



SS Moreton, salah satu kapal Belanda yang diboikot
<https://www.boombastis.com/aksi-black-armada/77725>

f. Peran CENKIM (Central Komite Indonesia Merdeka)

CENKIM adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda ke Digul :

- 1) Aksi sebelum 1945: turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak "Long Live the Republic of Indonesia " aksi ini diikuti juga oleh tentara Australia.
- 2) Aksi setelah 1945: anggota dari CENKIM (M.Bondan) mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan Agresi Militer I. Istri dari M. Bondan (Molly yang merupakan seseorang wanita Australia) menulis ulang berita tersebut dalam bahasa Inggris dan memberikannya pada pers Australia. Berita tersebut akhirnya tersebar di Australia dan akhirnya Australia membawa kasus Indonesia dan Belanda ke PBB.

3. Peranan Australia dalam mendukung kemerdekaan RI

- a. Inisiatif partai komunis Australia (ACP) dan pimpinan komunis dari serikat buruh perairan Australia pada 20 September 1945 diseluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas semua kapal belanda yang mau ke Indonesia.
- b. Tanggal 26 September 1945 Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia.
- c. Tanggal 28 September 1945 pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang sepanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia (Hands off Indonesia)
- d. Oktober 1945 Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1400 para tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney
- e. 31 Juli 1997 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB
- f. 12 Agustus 1947 Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dan Belanda
- g. 25 Agustus 1947 Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN

PENUGASAN 1

Anda diminta untuk mengidentifikasi pengakuan kemerdekaan RI dari negara luar dan menyebutkan faktor-faktor apa yang menyebabkan Negara tersebut memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

■ Tujuan

Melalui penugasan ini Anda diharapkan dapat :

1. Mengetahui bagaimana Respon Negara luar terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
2. Mengetahui Negara-negara mana saja yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia.
3. Mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan negara luar memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia.

■ Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Kertas HVS
2. Alat Tulis (Pulpen/Pensil)

■ Langkah-Langkah

Untuk penugasan ini, ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kertas HVS dan alat tulis!
2. Bacalah soal-soal dibawah, lalu tulislah jawaban dari soal-soal tersebut pada kertas HVS yang telah anda sediakan!
3. Jawablah pertanyaan dari soal-soal di bawah ini !

- a. Bagaimana pendapat Negara luar terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia ?

.....
.....
.....
.....

- b. Tuliskan Negara-negara mana saja yang pertama kali memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia ?

.....
.....
.....
.....

- c. Uraikan alasan, mengapa Negara-negara tersebut memberikan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia ?

.....
.....
.....
.....

■ Catatan Penting

1. Kerjakan tugas diatas sesuai dengan pengalaman dan modul yang telah Anda pelajari
2. Anda dapat membandingkan hasil penugasan yang Anda kerjakan dengan hasil pekerjaan teman lainnya agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Agar lebih optimal dalam mengerjakan tugas, diskusikan dengan Tutor dan sesama teman lainnya.
4. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

■ Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan nama PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial.

PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan panggung untuk dialog, oleh karena itu PBB sangat berperan penting dalam perang kemerdekaan di Indonesia karena di Indonesia banyak sekali peperangan yang terjadi baik itu dengan dalam negeri maupun dengan luar negeri seperti Belanda.



Gambar Bendera Persatuan Bangsa-Bangsa
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_United_Nations.svg

Peran PBB dalam kemerdekaan RI dapat dilihat dengan turut campurnya dalam peristiwa Agresi Belanda yang dilancarkan terhadap wilayah dan kedaulatan Republik Indonesia. Bahkan PBB secara bersungguh-sungguh turut memerdekakan dan berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 21 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu:

1. Bebaskan Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa hasil keputusan yang berhasil di capai oleh PBB, diantaranya adalah:

1. Piagam pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949).
2. Pembentukan RIS.
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
4. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
5. Piagam tentang kewarganegaraan.
6. Persetujuan tentang ekonomi-keuangan.
7. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure oleh Belanda di tandai dengan adanya Piagam Pengakuan Kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Dewan Keamanan PBB Mengeluarkan resolusi
Sumber : <https://pendidikanzone.blogspot.com>

A. Kontak Indonesia dengan PBB

Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Menindaklanjuti ajakan PBB maka Indonesia mengutus Sutan Syahrir untuk menghadiri sidang DK PBB. Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir menyampaikan beberapa hal :

1. Pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurutnya perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua

2. Untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran perlu dibentuk komisi pengawas.

B. Peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI

Peran PBB ditunjukkan dengan beberapa hal, diantaranya:

1. Pada tanggal 1 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain.
2. Pada tanggal 4 Agustus 1947 DK PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan diantara mereka dan aksi tembak menembak.
3. Pada tanggal 7 Agustus 1947 DK PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya.
4. Pada tanggal 25 Agustus 1947 DK PBB menerima usul AS tentang pembentukan pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik (Committee of Good Offices) untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri atas:
 - a. Australia (diwakili oleh Richard C. Kirby), atas pilihan Indonesia
 - b. Belgia (diwakili oleh Paul Van Zeeland), atas pilihan Belanda
 - c. Amerika Serikat (diwakili oleh Dr. Frank Porter Graham), atas pilihan Australia dan Belgia.
5. Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda antara lain:
 - a. Mendesak Belanda untuk segera dan sungguh-sungguh menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.
 - b. Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera tanpa syarat Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17 Desember 1948 di wilayah RI; pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas.

- c. Mengajukan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah ad interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949, Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
- d. Sebagai tambahan dari putusan Dewan Keamanan, Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI (United Nations Commission for Indonesia = Komisi PBB untuk Indonesia dengan kekuasaan yang lebih besar dari KTN. UNCI berhak mengambil keputusan yang mengikat berdasarkan suara Mayoritas. Anggota UNCI terdiri dari: Merle Cochran (AS), Critchley (Australia), dan Harremans (Belgia). Tugas UNCI adalah membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Republik; untuk mengamati pemilihan dan berhak memajukan usul-usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

6. Indonesia menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950

Pada tanggal 28 September 1950 Indonesia diterima sebagai anggota PBB yang ke-60. Hal ini berarti Kemerdekaan Indonesia secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Walaupun telah menjadi anggota PBB, bangsa Indonesia masih tetap berusaha untuk dapat mengembalikan wilayah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Usaha-



Foto : Perjuangan bersenjata dengan Tri Komando Rakyat (Trikorra)
Sumber : <http://www.hariansejarah.id/2017/04/10-foto-foto-operasi-trikorra-1961-1962.html>

usaha yang ditempuh melalui sidang Majelis Umum selalu mengalami kegagalan. Oleh karena itu, sejak tanggal 19 Desember 1961 Indonesia menempuh perjuangan bersenjata dengan Tri Komando Rakyat (Trikorra).

Akhirnya perjuangan bersenjata ini berhasil memaksa Belanda untuk menerima Persetujuan New York 15 Agustus 1962 dengan pokok-pokok persetujuan sebagai berikut:

- Penghentian permusuhan.
- Pembentukan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority). Dengan begitu kekuasaan sementara atas Irian Barat dipegang PBB. Adapun Tahap-tahap penyerahan Irian Barat ke RI adalah berikut :
 - 1) 1 Oktober 1962 - 1 Desember 1962: masa pemerintahan UNTEA bersama Kerajaan Belanda.
 - 2) 1 Januari 1963 - 1 Mei 1963: masa pemerintahan UNTEA bersama Republik Indonesia.
 - 3) Sejak 1 Mei 1963 wilayah Irian Barat sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.
- Tahun 1969 akan diadakan Art of Free Choice, yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pada tanggal 14 Juli 1969 Pepera dilaksanakan dengan keputusan rakyat Irian Barat tetap berada dalam Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan PBB dengan Indonesia memiliki dinamika politik yang cukup rumit. Makna hubungan tersebut dapat dijelaskan dalam peristiwa sejarah sebagai berikut:

1. Peran PBB

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

2. Sekilas Diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang



Sumber : <https://indopolitika.com/wp-content/uploads/2019/09/Bung-Karno-saat-berpidato-di-Sidang-Umum-PBB-XV.jpg>

sama ketika PBB didirikan dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Oleh sebab itu, banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai *“truly a child”* dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu beliau hanya sebagai “peninjau” di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka Sidang Majelis Umum PBB ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi Wakil Tetap RI dijabatnya hingga tahun 1953.

3. Masalah Irian Jaya

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Jaya dengan Belanda mengupayakan solusi dengan mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada PBB pada tahun 1954. Posisi Indonesia ini didukung oleh Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 yang mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung Indonesia dan kemudian meminta PBB untuk menjembatani kedua pihak yang berkonflik dalam meraih solusi damai. Namun demikian, hingga tahun 1961 tidak ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite I.

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa tersebut akhirnya menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi "The New York Agreement" pada 21 September 1962. Selanjutnya, United Nations Executive Authority (UNTEA) sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.

Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Setelah pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima untuk pertama kalinya.

Sebagai kelanjutan penyelesaian masalah Irian Barat, Pemerintah Indonesia melaksanakan "Pepera" di Irian Jaya (Papua) di bawah pengawasan PBB tahun 1969. Pelaksanaan Pepera



Sidang Dewan Musyawarah PEPERA di Fak-Fak yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 1969. Tampak Mendagri Amir Machmud sedang memberikan sambutannya.

<https://activehistory.ca/wp-content/uploads/2010/01/figure-6.jpg>

dilakukan secara demokratis dan transparan dengan melibatkan masyarakat Irian Jaya serta melibatkan partisipasi, bantuan, dan saran PBB melalui utusan khususnya yaitu Duta Besar Ortiz Sanz dari Bolivia. Pada akhirnya Pepera telah diterima oleh masyarakat internasional melalui sebuah Resolusi No. 2504 dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada 19 November 1969 yang mengukuhkan perpindahan kekuasaan di wilayah Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia.

4. Peran Indonesia dalam PBB

Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya, ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial), ILO (Organisasi Buruh Internasional), maupun FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai ketua sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik.

Pencapaian Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB adalah ketika pertama kali terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 1974-1975. Indonesia terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 1995-1996. Dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB pada periode tersebut, Wakil Tetap RI Nugroho Wisnumurti tercatat dua kali menjadi Presiden DK-PBB. Terakhir, Indonesia terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk masa bakti 2007-2009. Proses pemilihan dilakukan Majelis Umum PBB melalui pemungutan suara dengan perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.

Di Komisi Hukum Internasional PBB/International Law Commission (ILC), Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusuma Atmadja sebagai anggota ILC pada periode 1992-2001. Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011, setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB.

PBB sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, hendaknya selalu menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang.

Reformasi PBB khususnya Dewan Keamanan agar lebih mencerminkan kondisi politik dunia saat ini penting dimajukan agar upaya ini dapat efektif dan memiliki nilai legitimasi. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam memajukan peranan PBB mengatasi krisis global dan pada saat yang sama menyerukan perlunya reformasi PBB.

Berikut ini adalah para Wakil Tetap RI yang pernah dan sedang mewakili Indonesia di PBB:

- a. Lambertus Nicodemus Palar, 1950-1953
- b. Sudjarwo Tjondronegoro, 1953-1957
- c. Ali Sastroamidjojo, 1957-1960
- d. Soekardjo Wirjopranoto, 1960-1962
- e. Lambertus Nicodemus Palar, 1962-1965
- f. Dr. H. Roeslan Abdulgani, 1967-1971
- g. Yoga Soegomo, 1971-1974
- h. Ch. Anwar Sani, 1974-1979
- i. Abdullah Kamil, 1979-1982
- j. Ali Alatas, 1982-1988
- k. Nana Sutresna, 1988-1992
- l. Noegroho Wisnumurti, 1992-1997
- m. Makarim Wibisono, 1997-2001
- n. Makmur Widodo, 2001-2004
- o. Rezlan Ishar Jenie, 2004-2007
- p. R.M. Marty M. Natalegawa, 2007-2009
- q. Hassan Kleib, 2010-2012
- r. Desra Percaya, 2012-Sekarang

PENUGASAN 2

Anda diminta untuk mengidentifikasi peran Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kemerdekaan Indonesia dan selanjutnya anda diminta untuk menuliskan hasil keputusan yang berhasil di capai PBB.

■ Tujuan

Melalui penugasan ini anda diharapkan dapat :

1. Mengetahui peran dan fungsi PBB terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia.
2. Menjelaskan hasil keputusan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia.
3. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dalam merebut Irian Barat.
4. Mengetahui isi dari Persetujuan New York 15 Agustus 1962.

■ Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Kertas HVS
2. Alat Tulis (Pulpen/Pensil)

■ Langkah-Langkah

Untuk penugasan ini, ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kertas HVS dan alat tulis!
2. Bacalah soal-soal dibawah, lalu tulislah jawaban dari soal-soal tersebut pada kertas HVS yang telah anda sediakan!
3. Jawablah pertanyaan dari soal-soal di bawah ini !

- a. Sebutkan peran dan fungsi PPB terhadap kemerdekaan Indonesia ?

.....

.....

.....

.....

UNIT 3

KONFERENSI MEJA BUNDAR DAN SIKAP BELANDA TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA

b. Tuliskan hasil keputusan yang di capai PPB dalam pengakuan kemerdekaanIndonesia ?

.....
.....
.....
.....

c. Uraikan Langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam merebut Irian Barat!

.....
.....
.....
.....

d. Tuliskan isi dari Persetujuan New York 15 Agustus 1962 !

.....
.....
.....
.....

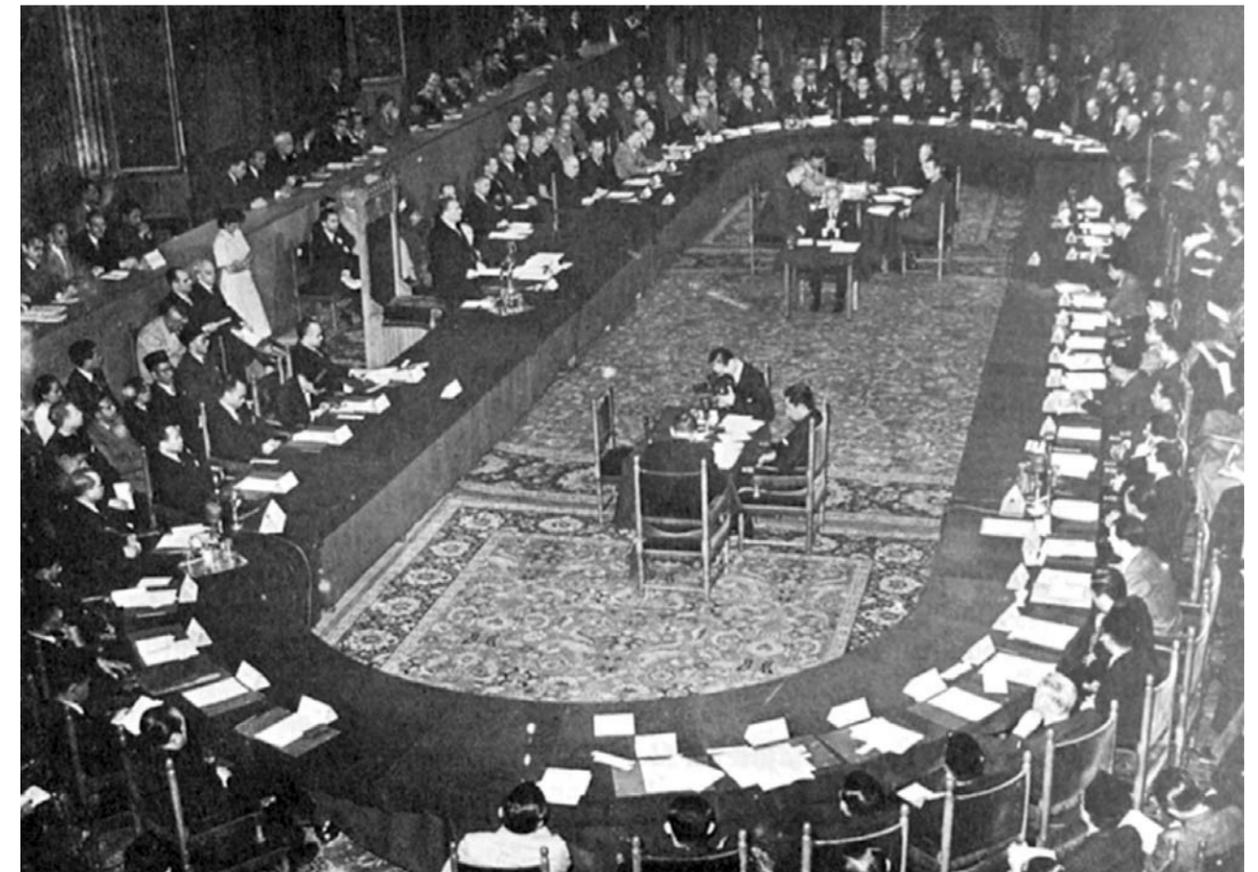
■ Catatan Penting

1. Kerjakan tugas diatas sesuai dengan pengalaman dan modul yang telah dipelajari
2. Anda dapat membandingkan penugasan yang Anda kerjakan dengan sesama teman lainnya agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Agar lebih optimal dalam mengerjakan tugas, diskusikan dengan Tutor dan sesame teman lainnya.
4. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

■ Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

Konferensi Meja Bundar atau Perjanjian KMB merupakan sebuah pertemuan (konferensi) yang bertempat di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di kepulauan Indonesia.



Gambar : Konferensi Meja Bunda (KMB)
Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar

A. Pengertian

Konferensi Meja Bundar adalah konferensi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 – 2 November 1949 yang terjadi di gedung perlemen Belanda.

1. Latar Belakang KMB

- a. Kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan
- b. Tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda

2. Tujuan

- a. Untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda
- b. Untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda
- c. Untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajah

B. Pembentukan Perwakilan Indonesia dan Peserta yang Hadir pada KMB

1. Pembentukan Perwakilan Indonesia pada KMB

Pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintahan RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari :

- Ketua : Moh. Hatta
- Anggota:
 - Mr. Moh Roem
 - Prof. Dr. Soepomo
 - dr. J. Leimina
 - Mr. Ali. S
 - Mr. Suyono Hadinoto
 - Dr. Sumitro Djojohadikusumo
 - Mr. Abdul Karim
 - Kolonel T.B. Simatupang
 - Dr. Muwardi

2. Peserta yang hadir dalam KMB

- Indonesia (Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Soepomo)
- BFO (Sultan Hamid II)
- Belanda (Mr. Van Marseveen)
- UNCI (Chritcley)



*J.H. van Maarseveen,
Sultan Hamid II dan
Mohammad Hatta
menandatangani
Perjanjian Meja Bundar, 2
November 1949
Sumber : [https://
id.wikipedia.org/wiki/
Konferensi_Meja_Bundar](https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar)*

3. Hasil KMB

- a. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat
- b. Pengakuan kedaulatan selambat – lambatnya tanggal 30 Desember 1949
- c. Masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam waktu 1 tahun
- d. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang di kepalai Raja Belanda
- e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dan beberapa korvet akan di serahkan ke RIS
- f. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara KNIL dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI

4. Dampak KMB

- a. Positif:
 - 1) Belanda mengakui Indonesia (Penyerahan Kedaulatan)
 - 2) Konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai
- b. Negatif:

Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia (menjadi bagian Indonesia kembali pada tahun 1969)

Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat:

- 1) Irian Barat kaya akan bahan tambang
- 2) Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik
- 3) Menjaga kehormatan Belanda di mata dunia
- 4) Irian Barat ingin dijadikan negara boneka Belanda

5. Penyerahan Kedaulatan RI

Setelah KMB dilaksanakan dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di 2 tempat pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949 wakil dari Indonesia berangkat ke Belanda

► Belanda

- Penyerahan kedaulatan di Belanda terjadi di ruang takhta Amsterdam Wakil dari Indonesia: Moh. Hatta
- Wakil dari Belanda: Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen

► Indonesia

- Wakil dari Indonesia: Sultan Hamengkubuwono IX
- Wakil dari Belanda: A.H.J Lovink

6. Sikap Belanda Terhadap Kemerdekaan RI

Pasca Indonesia memproklamkan sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, Belanda belum mau mengakui keberadaan Negara Indonesia secara *de jure* karena dianggap bentukan Jepang yang berbau fasisme. Berbagai usaha dilakukan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia, jalan kekerasan yang dilakukan semuanya berakhir dengan kegagalan dan mendapat kecaman keras dari dunia internasional.

Perjuangan menuju Indonesia merdeka banyak disorot oleh masyarakat di Indonesia dan dunia. Makna penting KMB menjadi titik tonggak kekuatan negara adalah sebagai berikut :

1. Politik

Duta Besar RI untuk Republik Chilli, Muhammad Anshor mengungkapkan, ada

empat ciri negara berdaulat. Yakni; memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki pemerintahan, dan memperoleh pengakuan dari negara berdaulat lain. Hal itu berdasarkan konvensi Montevideo 1933. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, banyak negara memberi pengakuan kepada Indonesia. Seperti; Mesir (tahun 1946), Vatikan (1947), Arab Saudi (1948), Suriah (1949), dan Turki (1949). Ia mengungkapkan, banyak entitas tidak mendapatkan pengakuan internasional sebagai sebuah negara. Contohnya; Kosovo, Sahrawi (Western Sahara), Palestina, Taiwan (Republic of China).

Negara Kosovo, misalnya, merdeka pada tahun 2008. Negara ini belum mendapat pengakuan dari banyak negara. Dengan demikian belum menjadi negara dan menjadi anggota PBB. Banyak negara tercatat menolak kemerdekaan Kosovo,” ujar Anshor dalam Diskusi 70 Tahun Pengakuan Kedaulatan Indonesia di Museum Perumusan Naskah Proklamas pada 28 Februari 2019.

Bukan hanya aktivitas militer yang penting untuk menjadi negara merdeka yang diakui internasional. Bukan pekik heroik dan angkat senjata saja. Tetapi perjuangan diplomasi ikut berperan penting. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus – 2 November 1949, lanjut Anshor, hasil diplomasi Indonesia dibawa ke Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian Resolusi DK PBB No,67 (S/RES/67) pada 28 Januari 1949 menyerukan dua hal yaitu:

- a. Kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.
- b. Agar penyerahan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada RIS dilakukan sebelum 1 Juli 1950. Anshor menjelaskan, Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957, mengukuhkan laut di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia berada di bawah kedaulatan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah NKRI. Setelah Deklarasi Juanda, luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km².

Setelah melalui perjuangan diplomasi yang panjang pada 1982, deklarasi Juanda dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi laut PBB ke III Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982).

2. Tantangan Ekonomi Global

Selanjutnya dilakukan diplomasi kewilayahan pada 1957 hingga 1969. Perjanjian New York yang ditandatangani pada 5 Agustus 1962 dan disahkan pada 1 Mei 1963. Ada lima tahanan dari perjanjian tersebut yaitu:

- c. Tindak lanjut atas masalah Irian (Papua) bagian Barat yang sebelumnya telah diangkat dalam KMB.
- d. Pemindahan kekuasaan atas Irian (Papua) Barat dari Belanda ke Indonesia melalui UNTEA.
- e. Irian (Papua) bagian Barat kembali ke Indonesia pada 1 Mei 1963.
- f. Indonesia wajib selenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969.
- g. Pada 19 November 1969, SU PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.



<https://zonadamai.files.wordpress.com/2012/03/pengakuan-kedaulatan-nkri-1950.jpg>

Sedangkan pasca-1969 hingga saat ini, menurut Anshor, dibagi dalam dua tahapan. Pertama pada 1975-1999. Merupakan perjuangan untuk mempertahankan Timor Timur (Timgim) melalui upaya diplomasi. Namun, Timor Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia melalui referendum 30 Agustus 1999.

Menurut Dirjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri ini bahwa yang harus dilawan adalah aksi propaganda aktivis Papua Merdeka. Mengantisipasi dan menghadapi tantangan keamanan non-tradisional, *cyber threat*, kejahatan lintas batas, perubahan iklim, pandemic penyakit, *energy security* dan *food security*. Menurutnya, saat ini Indonesia sebagai kekuatan global. Sebagai negara dengan demokrasi yang semakin kuat. Diharapkan ada penguatan dalam diplomasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

PENUGASAN 3

Anda diminta mengalisis Proses pengakuan kemerdekaan RI melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia.

■ Tujuan

Melalui penugasan ini anda diharapkan dapat :

1. Mengetahui proses pengakuan kemerdekaan Indonesia melalui Konferensi Meja Bunda (KMB).
2. Mengetahui sikap belanda terhadap kemerdekaan RI.

■ Media

Untuk melakukan penugasan ini, Anda diminta untuk menyiapkan:

1. Kertas HVS
2. Alat Tulis (Pulpen/Pensil)

■ Langkah-Langkah

Untuk penugasan ini, ikutilah langkah-langkah berikut:

1. Siapkan kertas HVS dan alat tulis!
2. Bacalah soal-soal dibawah, lalu tulislah jawaban dari soal-soal tersebut pada kertas HVS yang telah anda sediakan!
3. Jawablah pertanyaan dari soal-soal di bawah ini !

- a. Tuliskan apa tujuan dilaksanakannya KMB !

.....

.....

.....

.....

- b. Tuliskan siapa saja peserta yang hadir dalam KMB!

.....

.....

.....

.....

c. Uraikan dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia !

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Uraikan bagaimana sikap Belanda terhadap Kemerdekaan RI !

.....
.....
.....
.....

■ Catatan Penting

1. Kerjakan tugas diatas sesuai dengan pengalaman dan modul yang telah dipelajari
2. Anda dapat membandingkan hasil penugasan yang Anda kerjakan dengan hasil pekerjaan teman lainnya agar dapat saling berbagi pengalaman.
3. Agar lebih optimal dalam mengerjakan tugas, diskusikan dengan tutor dan teman lainnya.
4. Setelah mengerjakan penugasan ini Anda dapat menuliskan kesimpulan Anda sendiri mengenai unit yang sudah Anda pelajari.

■ Kesimpulan

.....
.....
.....
.....

Rangkuman

- Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
- Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.
- Sebab-Sebab Mesir Memberi Pengakuan Kemerdekaan Riadalah: Persamaan Agama, Banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir dan banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Arab.
- Peran Mesir dalam Mendukung Kemerdekaan RI adalah: peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin Syaikh Hasan Al-Banna, aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo, mengirim delegasi Mesir (Abdul Mun'im) ke Yogyakarta, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI (18 Nov 1946), ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara RI (H. Agus Salim) dan Mesir (Fahmi Nokrasyi Pasha) (10 Juni 1947), Menteri LN Mesir dibawah kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia, aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal Belanda dan Rapat Umum oleh organisasi dan parpol di Mesir.
- Sebab-Sebab India Memberi Pengakuan Kemerdekaan RI adalah Persamaan Kebudyaaan (Hindu-Budha), Persamaan nasib (sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka) dan hubungan dekat antara pemimpin negara (Nehru dan Moh. Hatta) (Feb 1927).
- Usaha Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di dunia Internasional juga dilakukan terhadap tetangga dekat Indonesia, yaitu Australia. Walaupun Australia bukan negara Asia, namun lokasi geografisnya yang dekat dengan Indonesia, yaitu hanya dipisah oleh Laut Timor.
- Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia, para pekerja dari Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Seamen's Union In Sydney (Asosiasi Pekerja), asosiasi tersebut terkejut melihat diskriminasi yang terjadi antara buruh kapal dan perwira kapal, asosiasi tersebut memberi tahu pekerja Indonesia bahwa mereka bekerja di Australia yang dihormati hak-haknya sebagai pekerja serta memiliki hak untuk protes. Diskriminasi

yang terjadi antara lain buruh kapal bekerja di lingkungan yang jelek dan gaji sangat minim dan perwira kapal gaji layak seperti orang eropa, kerja di lingkungan yang bagus

- PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa
- Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa hasil keputusan yang berhasil di capai oleh PBB, diantaranya adalah Piagam pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949), pembentukan RIS, Pembentukan Uni Indonesia-Belanda, pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS, Piagam tentang kewarganegaraan, Persetujuan tentang ekonomi-keuangan dan masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Saran Referensi

Karena modul ini masih memiliki keterbatasan dalam penyajian materi maka disarankan kepada peserta didik untuk membaca:

Abdurakhman, 2018. Sejarah Indonesia. Jakarta: Penerbit Gramedia

Maeswara, Garda, 2010. Sejarah Revolusi Indonesia 1945 - 1950: Perjuangan Bersenjata& Diplomasi untuk Mempertahankan Kemerdekaan : Narasi

<https://kemlu.go.id/amman/id/pages/indonesia-palestine/2415/etc-menu>

<https://kemlu.go.id/cairo/id/news/1178/konsultasi-bilateral-indonesia-mesir-2019-ri-mesir-sepakati-peningkatan-kerja-sama-ekonomi-kedua-negara>

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/579/berita/indonesia-india-dorong-kerja-sama-ekonomi-dan-maritim>

<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-01-04/70-tahun-hubungan-diplomatik-australia-dan-indonesia/11839228>

Soal Latihan

A. Petunjuk mengerjakan soal :

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal!
2. Kerjakanlah soal yang menurut Anda mudah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke soal yang lebih rumit!
3. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan memberi tanda silang atau centang!

B. Soal-soal pilihan ganda:

1. Pengakuan dari Negara-negara sebagai Negara yang berdaulat secara hukum, disebut dengan ...
 - a. De Facto
 - b. Independen
 - c. Merdeka
 - d. De Jure
 - e. Status Quo
2. Negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah...
 - a. Palestina
 - b. Malaysia
 - c. Amerika Serikat
 - d. Inggris
 - e. Jerman
3. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan kedaulatan dari Negara lain adalah dengan memberikan bantuan beras 500.000 ton ke pada pemerintah dan rakyat india yang sedang mengalami bahaya kelaparan, yang dikenal dengan peristiwa...
 - a. India Rice
 - b. Diplomasi India
 - c. Indonesia Rice
 - d. Konferensi Asia
 - e. Jalur Beras
4. Salah satu peristiwa yang menunjukkan intervensi dari pemerintah Australia dalam mendukung pemerintah Indonesia menjadi negara berdaulat adalah...
 - a. Memberikan bantuan persenjataan kepada Indonesia
 - b. Menghancurkan kapal-kapal Belanda yang berlabuh di Australia

- c. Memberikan pinjaman dana
 - d. Melatih pasukan bersenjata Indonesia
 - e. Memboikot kapal-kapal Belanda yang membuat senjata untuk dibawa ke Indonesia
5. Pada tanggal 12 Agustus 1947, Negara yang berhasil meyakinkan Dewan Keamanan PBB bahwa Indonesia merupakan salah satu pihak yang berselisih dan memiliki kedudukan yang sederajat dalam persengketaan Indonesia-Belanda adalah...
- a. Amerika Serikat
 - b. Uni Soviet
 - c. Australia
 - d. Cina
 - e. Malaysia
6. Organisasi internasional yang beranggotakan hampir seluruh Negara di dunia untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi dan perlindungan adalah...
- a. NATO
 - b. PBB
 - c. MEE
 - d. ASEAN
 - e. OPEC
7. Salah satu isi dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang bersidang pada tanggal 21 Januari 1949 adalah...
- a. membebaskan presiden dan wakil presiden
 - b. pembentukan Republik Indonesia Serikat
 - c. pembentukan Tentara Nasional Indonesia
 - d. Pembubaran tentara KNIL dan KIL
 - e. Pembentukan Uni Indonesia – Belanda
8. Negara Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal...
- a. 17 Agustus 1945
 - b. 17 Agustus 1946
 - c. 17 Agustus 1947
 - d. 17 Agustus 1949
 - e. 17 Agustus 1950

9. Pada tanggal 28 September 1950, dunia secara resmi mengakui Kemerdekaan Indonesia, peristiwa ini ditandai dengan...
- a. Kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI
 - b. Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 PBB
 - c. Melakukan Aksi bersenjata dengan Trikora
 - d. Piagam Pengakuan Kedaulatan
 - e. Pembentukan Kabinet
10. Berikut ini adalah isi dari pokok-pokok persetujuan New York tanggal 15 Agustus 1962 yang telah di setujui oleh Belanda, kecuali...
- a. Membebaskan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia
 - b. Penghentian permusuhan
 - c. Pembentukan United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)
 - d. Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera)
 - e. Kekuasaan sementara atas Irian Barat dipegang oleh PBB
11. Pertemuan (konferensi) yang bertempat di Den Haag, Belanda yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 antara Republik Indonesia, Belanda dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dikenal dengan nama...
- a. Perjanjian Renville
 - b. Perjanjian Linggarjati
 - c. Konferensi Meja Bundar
 - d. Perjanjian Bongaya
 - e. Perjanjian New York
12. Berikut ini adalah tujuan dari dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar, kecuali...
- a. Memperoleh kedaulatan dari Belanda
 - b. Menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda
 - c. Menjadikan Indonesia Negara yang benar-benar merdeka
 - d. Indonesia tetap dalam kekuasaan Belanda
 - e. Indonesia bebas dari penjajah

13. Ketua Delegasi Indonesia untuk menghadiri KMB adalah...

- a. Ir. Soekarno
- b. Moh. Hatta
- c. Mr. Moh. Roem
- d. Dr. J. Leimina
- e. Prof. Dr. Soepomo

14. Salah satu dampak positif dari perjanjian KMB adalah....

- a. Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia
- b. kapal-kapal perang Belanda di serahkan ke Indonesia
- c. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia
- d. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibubarkan
- e. Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

15. Yang mewakili Indonesia pada penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam adalah....

- a. Soekarno
- b. Sultan Hamengkubuwono IX
- c. Sutan Syahrir
- d. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
- e. Moh. Hatta

Kunci Jawaban

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. D | 6. B | 11. C |
| 2. B | 7. A | 12. D |
| 3. A | 8. E | 13. B |
| 4. E | 9. B | 14. C |
| 5. C | 10. A | 15. D |

RUBRIK PENUGASAN UNIT 1

| Aspek yang dinilai | Skor per aspek | Skor maksimum | Nilai yang diperoleh |
|--|----------------|---------------|----------------------|
| • Menuliskan hasil laporan dengan bahasa yang tepat dan jelas | 30 | 100 | |
| • Penjelasan tentang respon negara luar terhadap kemerdekaan Indonesia | 40 | | |
| • Mencantumkan hasil kerja yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil diskusi | 30 | | |
| Total Skor | | 100 | |

RUBRIK PENUGASAN UNIT 2

| Aspek yang dinilai | Skor per aspek | Skor maksimum | Nilai yang diperoleh |
|--|----------------|---------------|----------------------|
| • Menuliskan hasil laporan dengan bahasa yang tepat dan jelas | 30 | 100 | |
| • Penjelasan tentang respon negara luar terhadap kemerdekaan Indonesia | 40 | | |
| • Mencantumkan hasil kerja yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil diskusi | 30 | | |
| Total Skor | | 100 | |

RUBRIK PENUGASAN UNIT 3

| Aspek yang dinilai | Skor per aspek | Skor maksimum | Nilai yang diperoleh |
|--|----------------|---------------|----------------------|
| • Menuliskan hasil laporan dengan bahasa yang tepat dan jelas | 30 | 100 | |
| • Penjelasan tentang respon negara luar terhadap kemerdekaan Indonesia | 40 | | |
| • Mencantumkan hasil kerja yang memuat waktu, tempat, peserta, dan hasil diskusi | 30 | | |
| Total Skor | | 100 | |

RUBRIK PENILAIAN

1. Setiap soal yang dijawab bernilai 1 (satu)
2. Skor akhir menggunakan skala 1 s.d. 100
3. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\text{Skor Akhir} = \frac{\text{Jumlah soal yang benar}}{\text{Total soal}} \times 100$$

Contoh :

Jumlah soal yang benar adalah 10, dan Total soal = 15, maka skor akhir adalah :

$$\text{Skor Akhir} = \frac{10}{15} \times 100$$

$$\text{Skor Akhir} = 66,7$$

Kriteria Pindah/Lulus Modul

1. Telah mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
2. Telah melakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul dengan baik.
3. Telah mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul.
4. Mendapat hasil penilaian pemahaman memiliki skor 70 atau lebih.

Daftar Pustaka

Ahmad Syafii Maarif, 2003. Benedetto Croce dan Gagasannya Tentang Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah

Harold Crouch, 1999. Militer dan Politik di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Herbert Feith, 1995. Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Lev Daniel S, 1967. The Political Role of the Army in Indonesia. San Fransisco: Chander Publishing Company.

Miriam Budiardjo, 1996. Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Nasional, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Nugroho Notosusanto, 1977. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka

Sekretaris Negara RI. Herbert Feith, 1995: Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Sartono Kartodirjo, 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan

<https://labsmabintang.files.wordpress.com/2017/07/sejarah-respon-kemerdekaan.pdf>

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/07/19/inilah-negara-pertama-yang-mengakui-kemerdekaan-indonesia>

<https://marsyaholmes.blogspot.com/2015/09/diplomasi-ri-untuk-memperoleh-pengakuan.html>

<http://myhabitxxm.blogspot.com/2017/11/kmb-dan-sikap-belandaterhadap.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1945%E2%80%931949\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1945%E2%80%931949))

Biodata Penulis

Aminullah, S.Pd.,M.Pd.

Lahir di Tabuakkang 1972. Anak ke 3 dari 5 bersaudara dari bapak H.M Malayu Irsyad Dg Salle dan Hj.B Dg Rela. Tinggal di Tabuakkang Desa Katangka Kab. Gowa, Hp. 082393694612, email: aminullahbella@yahoo.co.id.

Menamatkan SD sampai SMA di Bontonompo kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di IKIP Ujung Pandang dan selesai tahun 1998. Pada tahun 2014 memperoleh gelar Magister Pendidikan pada bidang Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar.

Pada tahun 2005 di terima dan diangkat menjadi Aparat Sipil Negara dalam lingkup Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V dan memperoleh jabatan tenaga Fungsional Pamong Belajar.

Dalam karir kedinasan pernah dikirim oleh Kementerian Pendidikan RI menjadi Guru anak-anak TKI di Sabah Malaysia pada tahun 2009 sampai 2011. Disamping itu juga aktif sebagai wartawan pada beberapa majalah dan sebuah surat kabar harian di Kota Makassar sampai 2017.

Beberapa artikel yang pernah di tulis dalam jurnal ilmiah antara lain model pembelajaran berbasis ramah anak pada lingkungan PAUD, Model Pembelajaran Terpadu Tipe Jaring Laba-Laba Untuk Meningkatkan Perkembangan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak.



Ady Wijaya

Lahir di Ujungpandang 1976. Anak Pertama dari 3 bersaudara dari Bapak Drs. Idris Maudu dan Husnah Karim, BBA. Tinggal di Perumahan Taborong Permai Blok A3/3 Pallangga Kab. Gowa, Hp. 085298433276 email : adix76@gmail.com

Menyelesaikan pendidikan sarjana di STMIK Dipanegara pada Tahun 2000. Pada tahun 2010 memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar.



Pada tahun 2001 di terima dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Sulawesi Selatan dan memperoleh jabatan Tenaga Fungsional Pamong Belajar.

Muhammad Yunus

lahir di Ujung Soppeng tanggal 31 Desember 1965 anak ke 4 dari 4 bersaudara dari ayah H.A. Muh.Kasim dan Ibu Hj.A.Kadde.

Tinggal di kota Makassar Jl Aroeppala BTN Minasa Minasa Upa Blok AB.13 Nomor 7 HP.081342559072 email ; muhammad.yunus425@yahoo.co.id



Tamat SD Negeri 118 Ujung Soppeng tahun 1978, Tamat SMP Negeri Cabbenge Soppeng tahun 1981 dan tamat SMA Negeri Cangadi Soppeng tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan ke kota Makassar ibu kota propinsi Sulawesi Selatan tahun 1984 di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) memperoleh gelar sarjana pada bulan September tahun 1989.

Pada awal bulan Desember tahun 1989 diangkat menjadi tenaga pengajar tetap yayasaan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sampai tahun 2005.

Pada tahun 2005 di terima dan diangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional V dan memperoleh jabatan tenaga Fungsional Pamong Belajar sampai sekarang.